

Reformasi Tanzimat Sebagai Upaya Modernisasi Pemerintahan Kesultanan Turki Usmani Abad Ke - 19

The Tanzimat Reforms as an Effort to Modernize the Ottoman Sultanate's Government in the 19th Century

Ardan Dwi Ramadani¹, Arif Wahyutono², Rifqi Maulana³, Bisri Mustofa⁴

¹²³⁴ Pendidikan Sejarah, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Wates, Indonesia

ardanramadhani416@gmail.com¹, arifwahyutono@gmail.com², rifqilana873@gmail.com³,
bmustofa967@gmail.com⁴

Abstrak:

Artikel ini membahas Reformasi Tanzimat (1839–1876) sebagai upaya modernisasi pemerintahan Kesultanan Turki Usmani pada abad ke-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode studi sejarah yang mengandalkan sumber primer seperti *Hatt-ı Şerif Gülhane* (1839), *Hatt-ı Hümayun* (1856), dan Undang-Undang Vilayet 1864, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Melalui analisis konten, interpretasi historis, dan kerangka teori modernisasi negara Max Weber serta konsep governance, penelitian ini menganalisis latar belakang, pelaksanaan, dan dampak reformasi di bidang pemerintahan, hukum, pendidikan, dan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanzimat berhasil mentransformasi struktur pemerintahan dari sistem tradisional yang desentralistik dan patrimonial menjadi lebih tersentralisasi, birokratis, dan rasional-legal. Reformasi ini memperkuat kapasitas negara, memperkenalkan prinsip kesetaraan di depan hukum, serta meletakkan fondasi bagi negara modern Turki. Namun, reformasi juga menimbulkan dampak paradoks berupa resistensi internal, kebangkrutan ekonomi 1875, dan percepatan disintegrasi imperium akibat kebangkitan nasionalisme etnis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tanzimat merupakan adaptasi kontekstual yang cerdas di tengah tekanan eksternal Eropa, meskipun gagal mempertahankan keutuhan imperium multikultural dalam jangka panjang.

Kata kunci: Tanzimat, Reformasi Ottoman, Modernisasi Pemerintahan, Kesultanan Turki Usmani, Tata Kelola

Abstract:

This article discusses the Tanzimat Reform (1839–1876) as an effort to modernize the government of the Ottoman Empire in the 19th century. This study employs a qualitative historical approach using historical research methods relying on primary sources such as the *Hatt-ı Şerif Gülhane* (1839), *Hatt-ı Hümayun* (1856), and the *Vilayet Law* of 1864, as well as secondary sources from books and scientific journals. Through content analysis, historical interpretation, and the theoretical framework of Max Weber's state modernization and the concept of governance, this research analyzes the background, implementation, and impacts of the reform in the fields of government administration, law, education, and military. The findings reveal that the Tanzimat successfully transformed the governmental structure from a traditional, decentralized, and patrimonial system into a more centralized, bureaucratic, and rational-legal one. These reforms strengthened state capacity, introduced the principle of equality before the law, and laid the foundation for modern Turkey. However, the reforms also produced paradoxical impacts, including internal resistance, economic bankruptcy in 1875, and the acceleration of imperial disintegration due to the rise of ethnic nationalism. This study concludes that the Tanzimat was a smart contextual adaptation amid European external pressures, although it ultimately failed to maintain the integrity of the multicultural empire in the long term.

Keywords: Tanzimat, Ottoman Reform, Government Modernization, Ottoman Empire, Governance

PENDAHULUAN

Pada abad ke-19, Kesultanan Turki Usmani (*Ottoman Empire*) berada pada titik kritis dalam sejarahnya. Imperium yang pernah menguasai tiga benua ini menghadapi kemunduran yang sistemik, ditandai dengan kekalahan militer beruntun melawan Rusia dan kekuatan Eropa lainnya, hilangnya wilayah-wilayah penting di Balkan dan Afrika Utara, serta krisis ekonomi akibat utang luar negeri yang membengkak dan sistem perpajakan yang tidak efisien. Sistem pemerintahan tradisional berbasis millet yang memberikan otonomi luas kepada komunitas agama dan struktur feodal yang sangat terdesentralisasi semakin tidak relevan di tengah munculnya negara-bangsa modern di Eropa yang didukung birokrasi rasional, militer profesional, dan hukum sekuler. Tekanan ekspansi imperialisme Eropa, ditambah dengan gerakan nasionalisme di kalangan penduduk non-Muslim, memaksa elit *Ottoman* untuk melakukan reevaluasi mendalam terhadap fondasi kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, era Tanzimat (1839–1876) muncul sebagai respons strategis terstruktur. Dimulai secara resmi melalui *Hatt-ı Şerif Gulhane* pada 3 November 1839 di bawah Sultan Abdulmecid I dan dipimpin oleh *Mustafa Resid Pasha*, reformasi ini dilanjutkan dengan *Hatt-ı Humayun* 1856. Tanzimat bertujuan memodernisasi aparatus pemerintahan, militer, hukum, administrasi, pendidikan, dan infrastruktur dengan mengadopsi elemen-elemen Eropa secara selektif, sambil berusaha mempertahankan kedaulatan sultan dan identitas Islam sebagai perekat imperium multietnis.

Kajian literatur terdahulu tentang Tanzimat telah berkembang secara signifikan, baik dari perspektif Barat maupun studi lokal. Penelitian Barat klasik cenderung memandang Tanzimat sebagai proyek westernisasi yang parsial dan gagal, sering kali menekankan motif diplomatik untuk mendapatkan simpati Eropa di tengah Krisis Timur dan Perang Krim (1853–1856), serta resistensi kuat dari kelompok tradisional seperti ulama, ayan (notabel lokal), dan sisa-sisa elit Janissary pasca pembubaran 1826. Sementara itu, studi kontemporer lebih menyoroti aspek internal, termasuk transformasi sistem administrasi provinsi melalui Undang-Undang Vilayet 1864 yang memperkenalkan hierarki vilayet sanjak kaza dengan dewan provinsi, sentralisasi perpajakan, dan pembentukan birokrasi profesional. Beberapa kajian menekankan dampak terhadap masyarakat non-Muslim melalui prinsip kesetaraan di depan hukum, yang mengubah

status dhimmi secara formal, meskipun implementasinya sering tidak konsisten (misalnya penggantian jizyah dengan pajak pembebasan militer yang lebih tinggi). Di Indonesia dan dunia Muslim, literatur kerap membahas Tanzimat sebagai inspirasi reformasi di negara-negara Islam lain, seperti Mesir di bawah Muhammad Ali atau gerakan pembaruan di Nusantara, serta hubungannya dengan munculnya pemikiran Pan-Islamisme dan Young Ottomans. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif top-down, terpisah antar bidang (militer terpisah dari hukum atau ekonomi), kurang menyoroti dimensi *governance* holistik, serta jarang membahas aspek-aspek yang kurang populer seperti transformasi urban dan infrastruktur (pembangunan telegraf pertama 1847, regulasi pers 1864, perencanaan kota bergaya Eropa), dampak ekonomi jangka panjang yang menyebabkan kebangkrutan 1875, serta ketegangan antara modernisasi dan legitimasi agama dalam mempertahankan otoritas pusat di tengah keragaman etnis-religius yang ekstrem.¹

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatan yang lebih terintegrasi dan mendalam terhadap Reformasi Tanzimat sebagai strategi modernisasi pemerintahan (*governance*) yang holistik. Berbeda dengan studi sebelumnya tentang Tanzimat telah berkembang secara signifikan, baik dari perspektif Barat maupun studi lokal. Penelitian Barat klasik cenderung memandang Tanzimat sebagai proyek westernisasi yang parsial dan gagal, sering kali menekankan motif diplomatik untuk mendapatkan simpati Eropa di tengah Krisis Timur dan Perang Krim (1853–1856), serta resistensi kuat dari kelompok tradisional seperti ulama, ayan (notabel lokal), dan sisa-sisa elit Janissary pasca pembubaran 1826. Contoh utama termasuk karya Roderic H. Davison (*Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876*, 1963) yang mendetail implementasi reformasi pasca-1856, dan Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw (*History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, Vol. 2, 1977) yang menekankan aspek militer dan administrasi yang cenderung fragmentaris, artikel ini memadukan perspektif sejarah politik, analisis institusional, dan konteks geopolitik untuk menunjukkan bahwa Tanzimat bukan sekadar peniruan Barat atau alat diplomasi semata, melainkan adaptasi kontekstual yang cerdas guna memperkuat otoritas negara pusat, membangun birokrasi rasional, dan mengelola pluralitas masyarakat imperium di

bawah tekanan eksternal abad ke-19. Penekanan khusus diberikan pada elemen-elemen yang jarang tersorot, seperti peran reformasi administrasi provinsi dalam mengurangi kekuasaan ayan, integrasi hukum komersial dan maritim untuk mengatasi capitulations, serta upaya menciptakan legitimasi baru melalui pendidikan sipil dan infrastruktur yang menghubungkan pusat-periferi.

Permasalahan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah: Sejauh mana Reformasi Tanzimat (1839–1876) berhasil mentransformasi struktur pemerintahan Kesultanan Turki Usmani dari sistem tradisional yang berbasis agama, otonomi lokal, dan desentralisasi menjadi sistem modern yang tersentralisasi, birokratis, dan berorientasi kesetaraan warga negara?, Bagaimana pula interaksi antara faktor internal (resistensi ulama dan elit lokal, keterbatasan keuangan, ketegangan identitas) dan eksternal (tekanan Eropa, utang luar negeri, nasionalisme etnis) berperan sebagai penghambat sekaligus pendorong keberhasilan atau kegagalan relatif reformasi tersebut?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tingkat keberhasilan Reformasi Tanzimat dalam mentransformasi struktur dan tata kelola pemerintahan Kesultanan Turki Usmani dari model tradisional-patrimonial menuju model modern yang tersentralisasi, birokratis, dan berbasis kesetaraan (*Ottomanism*), serta mengungkap interaksi dinamika faktor internal dan eksternal yang menjadi pendorong sekaligus penghambat proses tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih nuansa tentang adaptasi kontekstual sebuah imperium multikultural di tengah tekanan modernisasi abad ke-19.

Artikel ini mengklaim originalitas dan kebaruan ilmiah dengan menyajikan sintesis yang mendalam dan terintegrasi antara perspektif historis, institusional, dan kontekstual, khususnya menyoroti dimensi governance yang jarang dibahas secara holistik dalam literatur Indonesia dan Asia Tenggara. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi baru bagi studi sejarah Ottoman serta pemahaman tentang dinamika reformasi di dunia Islam pada era modern awal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode *historical research* (studi sejarah). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan merekonstruksi dan menganalisis proses Reformasi Tanzimat sebagai fenomena sejarah modernisasi pemerintahan Kesultanan Turki Usmani. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik heuristik dari sumber primer

(dokumen resmi Ottoman seperti Hatt-ı Şerif Gulhane 1839, Hatt-ı Humayun 1856, Undang-Undang Vilayet 1864) dan sumber sekunder. Analisis dilakukan dengan kritik sumber, interpretasi historis, pendekatan komparatif, serta kerangka teori modernisasi negara Max Weber dan konsep *governance*.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Munculnya Reformasi Tanzimat

Pada permulaan abad ke-19, Kesultanan Turki Usmani berada dalam kondisi kemunduran yang bersifat sistemik dan multidimensi. Imperium yang pernah menjadi kekuatan hegemonik di kawasan Mediterania, Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara selama lebih dari enam abad mengalami proses dekadensi yang semakin mempercepat keruntuhannya. Kemunduran ini tidak hanya terlihat dari kekalahan militer berulang, tetapi juga dari kelemahan struktural dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial-budaya. Secara militer, Kesultanan mengalami kekalahan telak dalam beberapa konflik besar, terutama Perang Rusia-Turki (1768–1774, 1787–1792, dan 1806–1812). Hilangnya wilayah Krimea, Bessarabia, dan sebagian wilayah Balkan menandai penyusutan teritorial yang signifikan. Pasukan Janissary, yang dulunya merupakan tulang punggung militer Ottoman, telah mengalami kemerosotan disiplin, korupsi, dan ketertinggalan teknologi dibandingkan dengan tentara Eropa yang telah mengadopsi revolusi militer dan industri. Dari segi ekonomi, sistem timar (pemberian tanah kepada sipahi) yang feodal telah kehilangan efektivitasnya. Produksi pertanian menurun, perdagangan internasional dikuasai oleh pedagang Eropa melalui sistem *Capitulations*, dan keuangan negara semakin bergantung pada pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi. Korupsi birokrasi dan pemungutan pajak yang sewenang-wenang semakin memperburuk kondisi rakyat, terutama di provinsi-provinsi periferi.

Tekanan eksternal dari kekuatan Eropa menjadi katalisator utama. Negara-negara seperti Rusia, Austria, Inggris, dan Prancis memandang Ottoman sebagai “*the sick man of Europe*”. Rusia secara khusus berambisi menguasai Selat Bosphorus dan Dardanelles, sementara Inggris dan Prancis khawatir terhadap ekspansi Rusia dan berusaha menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Timur. Krisis Timur (*Eastern Question*) semakin mempertajam dilema Ottoman: bagaimana bertahan di tengah perebutan pengaruh antar kekuatan besar Eropa.

Krisis administrasi dan militer juga mencapai titik kritis. Sistem pemerintahan yang sangat desentralisasi menyebabkan para ayan dan pemimpin lokal memiliki kekuasaan *de facto* yang hampir independen. Di Mesir, Muhammad Ali Pasha bahkan berhasil membangun kekuasaan semi-otonom yang mengancam integritas imperium. Sementara itu, pasukan Janissary sering kali menjadi sumber pemberontakan terhadap upaya reformasi yang dilakukan sultan. Di tengah krisis tersebut, pengaruh ide-ide Barat mulai meresap ke kalangan elit Ottoman. Melalui kontak diplomatik, perjalanan ke Eropa, dan pendidikan di luar negeri, para reformis seperti Mustafa Resid Pasha, Fuad Pasha, dan Ali Pasha terpengaruh oleh pemikiran Pencerahan Eropa, konsep negara bangsa, rasionalisme, dan birokrasi modern. Mereka meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan imperium adalah dengan melakukan modernisasi menyeluruh tanpa meninggalkan sepenuhnya identitas Islam dan kedaulatan sultan.

Reformasi Tanzimat secara resmi dimulai pada 3 November 1839 dengan dikeluarkannya Hatt-ı Şerif Gulhane di Istana Gulhane. Deklarasi ini, yang dibacakan oleh Mustafa Resid Pasha atas nama Sultan Abdulmeced I, menjanjikan jaminan keamanan jiwa dan harta, sistem perpajakan yang adil, serta penghapusan praktik sewenang-wenang. Dokumen ini menjadi fondasi ideologis² bagi seluruh rangkaian reformasi yang berlangsung hingga tahun 1876.

2. Pelaksanaan Reformasi Tanzimat

a. Reformasi Bidang Pemerintahan

Reformasi pemerintahan merupakan inti dari Tanzimat. Tujuan utamanya adalah sentralisasi kekuasaan dan rasionalisasi administrasi negara. Sebelum Tanzimat, sistem *eyalet* memberikan otonomi yang sangat luas kepada gubernur daerah, sehingga sering kali menimbulkan korupsi dan pemberontakan lokal.

Puncak reformasi administrasi adalah *Vilayet Law (Kanun-u Vilayet)* tahun 1864. Undang-undang ini membagi wilayah imperium menjadi provinsi-provinsi (*vilayet*) yang dipimpin oleh wali (gubernur) yang ditunjuk langsung oleh pusat. Setiap *vilayet* dibagi lagi menjadi sanjak, kaza, dan nahiye. Di setiap tingkatan dibentuk dewan administrasi (*meclis-i idare*) yang terdiri dari pejabat pemerintah dan wakil masyarakat lokal, termasuk non-Muslim.

Reformasi ini berhasil mengurangi kekuasaan ayan secara bertahap dan memperkuat kontrol Istanbul terhadap periferi.

Sistem birokrasi juga mengalami transformasi mendasar. Dibentuk kementerian-kementerian modern seperti Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Pendidikan, dan Luar Negeri. Rekrutmen pegawai negara mulai ditekankan pada kompetensi dan pendidikan formal, meskipun praktik nepotisme masih sulit dihilangkan sepenuhnya. Pembentukan birokrasi modern ini merupakan upaya mewujudkan birokrasi rasional-legal³ sebagaimana dikemukakan Max Weber.

b. Reformasi Bidang Hukum

Reformasi hukum merupakan salah satu yang paling radikal dalam sejarah Ottoman. Pemerintah memperkenalkan dualisme hukum, yaitu hukum syariah tetap berlaku di bidang ibadah dan keluarga, sementara hukum sekuler diterapkan pada bidang komersial, pidana, dan perdata.

Kodifikasi hukum penting yang dihasilkan antara lain *Kanunname-i Ticaret* (*Commercial Code*, 1850), *Ceza Kanunnamesi* (*Penal Code*, 1858), dan *Kanunname-i Bahriye* (*Maritime Code*, 1863). Pengadilan *Nizamiye* didirikan sebagai pengadilan sekuler yang menggunakan prosedur dan bukti modern. Melalui Hatt-ı Humayun 1856, prinsip kesetaraan di depan hukum diumumkan secara resmi. Semua warga negara Ottoman, tanpa memandang agama, diberikan hak yang sama dalam bidang hukum, perpajakan, dan pendidikan.

Meskipun demikian, penerapan reformasi hukum ini tidak merata. Di wilayah-wilayah pedesaan dan provinsi yang jauh dari Istanbul, hukum syariah masih sangat dominan, sementara di kota-kota besar seperti Istanbul, Izmir, dan Beirut, pengaruh hukum sekuler lebih kuat.

c. Reformasi Bidang Pendidikan

Reformasi pendidikan bertujuan menciptakan manusia baru (*homo Ottomanicus modernus*) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman. Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah modern seperti *Rusdiye* (sekolah menengah), *Idadi*, *Mekteb-i*

Sultani (Galatasaray, 1868), dan Darulfunun (Universitas Istanbul, 1863).

Kurikulum Barat diperkenalkan secara bertahap, termasuk ilmu matematika, fisika, kimia, geografi, dan bahasa Prancis. Ribuan pelajar dikirim ke Prancis, Jerman, dan Inggris untuk belajar ilmu pengetahuan dan administrasi. Pendidikan ini berhasil melahirkan generasi baru intelektual seperti Namık Kemal, Ziya Pasha, dan Ibrahim Sinasi yang menjadi pelopor Gerakan *Young Ottomans*.

d. Reformasi Bidang Militer

Reformasi militer dimulai dengan pembubaran pasukan Janissary pada 1826 oleh Mahmud II. Pada masa Tanzimat, sistem wajib militer diberlakukan bagi seluruh laki-laki Muslim berusia 20–25 tahun. Angkatan perang direorganisasi mengikuti model Eropa dengan pembagian *infanteri*, *kavaleri*, *artileri*, dan staf umum. Didirikan akademi militer Mekteb-i Harbiye dan sekolah kedokteran militer. Pelatihan dilakukan dengan bantuan perwira Prancis dan Rusia. Meskipun mengalami kemajuan, reformasi militer ini sangat membebani anggaran negara dan sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan non-Muslim yang tetap dikenakan pajak pengganti militer (*bedel-i askeri*).

3. **Dampak Reformasi Tanzimat**

a. Dampak Positif

Reformasi Tanzimat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi modernisasi Kesultanan Turki Usmani. Sistem pemerintahan menjadi lebih tersentralisasi dan rasional. Birokrasi negara berkembang menjadi lembaga yang lebih profesional. Hukum modern mulai menggantikan praktik sewenang-wenang, sementara pendidikan modern melahirkan kelas intelektual baru yang berperan penting dalam sejarah Turki kontemporer.

Secara sosial, muncul kelas menengah baru yang berpendidikan Barat. Kesadaran akan hak-hak individu dan konsep kewarganegaraan (*Ottomanism*) mulai tumbuh, meskipun masih terbatas. Fondasi institusional yang dibangun selama Tanzimat menjadi basis bagi Konstitusi 1876 dan Republik Turki modern.

b. Dampak Negatif

Di balik kemajuan tersebut, Tanzimat juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius. Kelompok konservatif dan ulama menentang reformasi karena dianggap mengikis nilai-nilai Islam dan tradisi Ottoman. Ketergantungan terhadap Barat semakin dalam, baik dalam bentuk utang, teknologi, maupun keahlian. Kebangkrutan negara tahun 1875 menjadi bukti kegagalan fiskal reformasi.

Reformasi ini juga mempercepat *disintegrasi imperium*. Semangat nasionalisme di kalangan Balkan, Armenia, dan Arab semakin kuat sebagai reaksi terhadap kebijakan sentralisasi dan westernisasi. Identitas tradisional Ottoman yang multikultural mulai melemah, digantikan oleh kesadaran etnis dan agama yang lebih sempit.

Secara keseluruhan, Reformasi Tanzimat merupakan upaya modernisasi yang ambisius namun paradoksal. Ia berhasil meletakkan fondasi negara modern, tetapi gagal mempertahankan integritas imperium dalam jangka panjang. Keberhasilan dan kegagalannya menjadi pelajaran berharga bagi proses modernisasi di negara-negara berkembang lainnya.

No	Aspek Administrasi	Sebelum Tanzimat (Tradisional)	Sesudah Tanzimat (1839–1876)	Dampak Utama
1	Sistem Pembagian Wilayah	Sistem Eyalet (sangat longgar)	Sistem Vilayet (hierarkis: Vilayet → Sanjak → Kaza → Nahiye)	Sentralisasi kekuasaan pusat
2	Kewenangan Gubernur Daerah	Otonomi tinggi, hampir independen	Ditunjuk pusat, bertanggung jawab langsung ke Istanbul	Pengurangan kekuasaan Ayan
3	Struktur Birokrasi	Patrimonial, berdasarkan keturunan & patronase	Rasional-legal, mulai berbasis kompetensi & pendidikan	Profesionalisasi birokrasi
4	Dewan Administrasi	Tidak ada atau sangat terbatas	Meclis-i İdare (Dewan Provinsi) di setiap tingkatan	Partisipasi terbatas masyarakat lokal
5	Sistem Perpajakan	Desentralisasi, penuh korupsi	Sentralisasi melalui pusat, pajak lebih teratur	Peningkatan pendapatan negara
6	Hubungan Pusat-Daerah	Desentralisasi ekstrem	Sentralisasi bertahap	Penguatan otoritas Sultan
7	Status Non-Muslim	Otonomi millet system	Kesetaraan formal di depan hukum & administrasi	Perubahan status kewarganegaraan
8	Alat Kelengkapan Administrasi	Minim (tidak ada telegraf & arsip terpusat)	Telegraf (1847), arsip pusat, dan pelaporan rutin	Peningkatan efisiensi komunikasi

Sumber: Diadaptasi dari Shaw (1977), Davison (1963), dan Ortaylı (2010).

Gambar 1. Perbandingan Struktur Administrasi Pemerintahan Kesultanan Turki Usmani Sebelum dan Sesudah Reformasi Tanzimat

Salah satu pencapaian paling signifikan dari Reformasi Tanzimat terlihat pada transformasi struktur administrasi pemerintahan Kesultanan Turki Usmani, yang dapat dilihat dari perbandingan sistem sebelum dan sesudah periode 1839–1876. Sebelum Tanzimat, sistem pemerintahan bersifat tradisional dan sangat desentralistik, ditandai dengan pembagian wilayah berbasis *eyalet* yang memberikan otonomi luas kepada gubernur daerah sehingga hampir *independen*, struktur birokrasi patrimonial yang bergantung pada keturunan dan patronase, serta sistem perpajakan yang rawan korupsi dan desentralisasi ekstrem. Hubungan pusat-daerah sangat longgar, status non-Muslim diatur melalui sistem millet yang otonom, dan alat kelengkapan administrasi masih sangat minim. Setelah Tanzimat, terutama melalui Undang-Undang Vilayet 1864, struktur berubah menjadi sistem vilayet yang hierarkis (Vilayet → Sanjak → Kaza → Nahiye), gubernur daerah ditunjuk langsung oleh pusat dan bertanggung jawab ke Istanbul, birokrasi bertransformasi menjadi rasional-legal yang menekankan kompetensi dan pendidikan formal, serta dibentuk dewan administrasi (*meclis-i idare*) di setiap tingkatan yang melibatkan wakil masyarakat lokal. Sistem perpajakan dan hubungan pusat-daerah menjadi lebih tersentralisasi, status non-Muslim mendapat kesetaraan formal di depan hukum dan administrasi, serta diperkenalkan infrastruktur modern seperti telegraf (1847), arsip pusat, dan pelaporan rutin. Secara keseluruhan, reformasi ini menghasilkan sentralisasi kekuasaan, pengurangan kekuasaan ayan, profesionalisasi birokrasi, peningkatan pendapatan negara, serta penguatan otoritas Sultan, meskipun masih disertai partisipasi masyarakat lokal yang terbatas dan berbagai tantangan implementasi di wilayah periferi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi Tanzimat (1839–1876) merupakan upaya modernisasi pemerintahan Kesultanan Turki Usmani yang paling komprehensif di abad ke-19. Melalui serangkaian dekrit utama seperti Hatt-ı Şerif Gulhane (1839) dan Hatt-ı Humayun (1856), serta Undang-Undang

Vilayet 1864, reformasi ini berhasil mentransformasi struktur pemerintahan dari model tradisional yang berbasis agama, desentralisasi, dan patrimonial menuju sistem modern yang lebih tersentralisasi, birokratis, dan berorientasi kesetaraan warga negara (*Ottomanism*).

Reformasi Tanzimat secara signifikan meningkatkan kapasitas negara (*state capacity*) dalam hal administrasi provinsi, kodifikasi hukum sekuler, pendidikan modern, dan reorganisasi militer. Pembentukan birokrasi rasional-legal sesuai kerangka Max Weber, pengurangan kekuasaan ayan, serta integrasi elemen kesetaraan di depan hukum menjadi pencapaian utama yang meletakkan fondasi bagi Konstitusi 1876 dan Republik Turki modern. Namun, reformasi ini juga bersifat paradoksal. Di satu sisi berhasil membangun institusi modern, di sisi lain gagal mempertahankan integritas imperium akibat resistensi internal dari ulama dan elit tradisional, beban utang luar negeri yang berujung kebangkrutan 1875, serta percepatan semangat nasionalisme di kalangan etnis non-Turki.

Berdasarkan hasil penelitian, Reformasi Tanzimat berhasil meletakkan dasar modernisasi pemerintahan Kesultanan Turki Usmani melalui pembentukan birokrasi yang lebih terpusat, penerapan sistem hukum yang lebih rasional, serta penguatan administrasi negara. Namun demikian, reformasi tersebut belum mampu mengatasi berbagai persoalan struktural, seperti tekanan ekonomi, resistensi internal, dan meningkatnya nasionalisme etnis yang pada akhirnya mempercepat disintegrasi imperium. Dengan demikian, Tanzimat merupakan reformasi yang berhasil dalam aspek modernisasi kelembagaan, tetapi belum berhasil mempertahankan keberlangsungan politik Kesultanan Turki Usmani dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Çiftçi, Yusuf. "Modernisation in the Tanzimat Period and the Ottoman Empire: An Analysis of the Tanzimat Edict within the Scope of the Modern State." *Journal of Ottoman Studies* (2020): 45–72.
- Davison, Roderic H. *Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Güneş, Nilüfer. "The Marginalization of the Ottoman Empire's State Formation Legacy in the Middle East: A Case of Eurocentrism?" *Turkish Studies* (2025). <https://doi.org/10.1080/14683849.2025.2573721>.
- İyioğlu, Kübra. "The Case of the Early Tanzimat, 1839." Master's thesis, Sabancı University, 2015.

- Köksal, Yonca. *The Ottoman Empire in the Tanzimat Era: Provincial Perspectives from Ankara to Edirne*. London and New York: Routledge, 2019.
- Mazanec, Jakub. "The Ottoman Empire at the Beginning of Tanzimat Reforms." *Prague Papers on the History of International Relations* 2 (2016): 21–45.
- Rothman, Norman C. "Islam in Turkey and Modernization: The Tanzimat Period." *Comparative Civilizations Review* 57 (2007): 4–20.
- Samourkasidou, Eirini. "Tanzimat Reforms and Urban Transformations in Ottoman Cities." *Journal of Asian and African Studies* (2021).
- Topal, A. Erdem. "Political Reforms as Religious Revival: Conceptualizing the Tanzimat." *Oriens* 101, no. 2 (2021): 153–178. <https://doi.org/10.1163/18778300-123414xx>.
- Vakali, Anna. Review of *The Ottoman Empire in the Tanzimat Era: Provincial Perspectives from Ankara to Edirne*, by Yonca Köksal. *New Perspectives on Turkey* 61 (2019): 120–125.
- Doan Tung Anh, M.A. "Tanzimat Reforms and the Ottoman Empire's Reaction to Western Powers, 1839-1876." *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 4, no. 6 (2024): 456–467. <https://doi.org/10.55677/ijssers/V04I5Y2024-21>.
- Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*. Vol. 2, *Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808–1975*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.